

ABSTRAK

Dalam praktek di wilayah Kabupaten Demak sekaligus sebagai gambaran parameter di kabupaten lain terdapat permasalahan yang kompleks yang hampir sama yang dihadapi oleh BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, wewenang maupun hak-haknya. Permasalahan yang di hadapi oleh BPD saat ini adalah: 1) masalah *internal* meliputi: a. Lemahnya pengorganisasian, b. Nihil dukungan staf dan kesekertariatan, c. Hak Bagi Anggota BPD Yang Kurang Jelas d. Minim Kapasitas Personal e. Saling curiga dengan pemerintah desa 2) Masalah eksternal meliputi: a. Permasalahan Pengisian anggota, b. Permasalahan tentang BPD tidak sejajar dengan kepala desa c. Permasalahan fungsi bpd yang terbatas, d. Hak BPD berupa tunjangan dan operasional BPD sangat rendah. e. Lemahnya regulasi pengaturan BPD dalam peraturan Pemerintah.

Paradigma penelitian yang dilakukan nantinya adalah konstruktivisme. Adapun Sumber data dalam penelitian ini nantinya adalah pada sumber data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari sejumlah responden. Disamping itu selain sumber data primer terdapat juga sumber data penelitian yaitu sumber data sekunder.

Dari hasil penelitian dapat di peroleh hasil berupa: 1) bahwa pemilihan langsung terhadap anggota BPD akan memberikan legitimasi (pengakuan) yang jauh lebih kuat kepada BPD, ketimbang pemilihan yang dilakukan secara keterwakilan. 2) menjadikan kedudukan BPD sejajar dengan Pemerintah Desa (Kepala Desa beserta perangkat desa). 3) memperjelas fungsi BPD dalam Penganggaran (*badgeting*) . 4) menegaskan aturan mengenai BPD dimuat dalam Peraturan Pemerintah. 5) mempertegas dan memperjelas hak Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan 6) memperoleh biaya operasional paling sedikit 10% dari Pendapatan Asli Desa berupa hasil lelangan bondo desa tiap tahun. 7) memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan paling sedikit 3 % dari Alokasi Dana Desa. 8) bagi BPD yang berprestasi dan/atau pesangon purna tugas berupa uang paling sedikit 10% dari Alokasi Dana Desa atau disesuaikan menurut kemampuan keuangan Desa.

Kata kunci: Rekonstruksi, Pemberdayaan BPD, Keadilan Bermartabat.

ABSTRACT

In practice in the Demak Regency area, as well as a description of the parameters in other districts, there are almost the same complex problems faced by the BPD in carrying out its duties and functions, powers and rights. The problems faced by BPD at this time are: 1) internal problems including: a. Weak organization, b. Zero staff and secretarial support, c. Unclear rights for BPD members d. Lack of Personal Capacity e. Mutual suspicion with the village government 2) Extrenal problems include: a. Member filling problem, b. The problem regarding the BPD is not on par with the village head c. Limited bpd function problems, d. BPD rights in the form of benefits and BPD operations are very low. e. Weak BPD regulatory regulations in Government regulations.

The research paradigm that will be carried out is constructivism. The data source in this study will later be primary data sources, namely data obtained directly from a number of respondents. Besides that, in addition to primary data sources, there are also research data sources, namely secondary data sources.

From the research results, the following results can be obtained in the form of: 1) that direct election of BPD members will provide much stronger legitimacy (recognition) to BPD, rather than representative elections. 2) make the BPD equal with the Village Government (Village Head and village apparatus). 3) clarifying the function of BPD in Budgeting (badgeting). 4) confirms the rules regarding BPD contained in Government Regulations. 5) reinforce and clarify the rights of the Village Consultative Council Leadership and members to obtain an allowance for the implementation of duties and functions from the Village Fund Allocation (ADD) of at least 10% and 6) obtain operational costs of at least 10% of the Village Original Income in the form of the proceeds from the village bondo auction every year. 7) obtaining capacity development through education and training, socialization, technical guidance, and field visits at least 3% of the Village Fund Allocation. 8) for BPD with achievements and / or retirement benefits in the form of money at least 10% of the Village Fund Allocation or adjusted according to the financial capacity of the Village.

Keywords: Reconstruction, Empowerment of BPD, Justice with dignity.